



Oleh: ROCHANI NANI RAHAYU<sup>1</sup> DAN SOBARI<sup>2</sup>  
Email: nanipdii@yahoo.com; sbrmshr9@gmail.com

# Peran Strategis Perpustakaan Khusus dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Induk: Kasus PDII LIPI

## Abstrak

Reformasi Birokrasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh Kementerian maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian di Indonesia, tidak terkecuali LIPI. Di dalam *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 disebutkan sasaran ke tiga Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu diidentifikasi berbagai peran strategis yang telah dilakukan oleh satuan kerja dalam hal ini perpustakaan khusus (PDII) dalam memberikan layanan publik. Makalah ini menguraikan peran strategis yang dilakukan oleh PDII LIPI dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di LIPI. Kajian dilakukan menggunakan metode *content analysis*. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran strategis PDII LIPI untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI adalah: 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Sertifikasi Profesi dan Uji Kompetensi; 2) Meningkatkan Kualitas Layanan PDII LIPI melalui ISO 9001:2008 yang diperbaharui menjadi ISO 9001:2015; 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan; 4) Meningkatkan Kerjasama Layanan antar *Stakeholder*; 5) Menanamkan nilai-nilai yang dianut di PDII (IDAMAN).

Berdasarkan hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa PDII LIPI telah melakukan sebanyak lima peran strategis dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Induknya yaitu LIPI.

**Kata kunci:** Reformasi birokrasi, PDII LIPI, Peran strategis.

## Abstract

*Bureaucratic reform is a mandatory thing for all Ministries and Non-Ministry Government Institutions in Indonesia, including LIPI. In the 2015-2019 LIPI Road Map (Roadmap) for Bureaucratic Reform, it is stated that the third target of Bureaucratic Reform is the realization of improving the quality of public services to the public. Therefore it is necessary to identify various strategic roles that have been carried out by the work unit in this particular library (PDII) in providing public services. This paper outlines the strategic role carried out by PDII LIPI in the framework of implementing Bureaucratic Reform (RB) at LIPI. The study was conducted using the content analysis method. The results of the study show that the strategic role of PDII LIPI to implement Bureaucratic Reform in the LIPI environment are: 1) Improving the Quality of Human Resources Through Professional Certification and Competency Tests; 2) Improving the Quality of PDII LIPI Services through updated ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015; 3) Improve Service Facilities and Infrastructure; 4) Improve Service Cooperation between Stake Holders; 5) Instill the values adopted in PDII (IDAMAN). Based on the results and discussion it was concluded that PDII LIPI had carried out five strategic roles in the Implementation of its Parent Institution's Bureaucratic Reform, LIPI.*

**Keywords:** Bureaucratic reform, PDII LIPI, strategic role.

<sup>1</sup> Pustakawan PDII LIPI

<sup>2</sup> Kandidat Pustakawan PDII LIPI

**Pendahuluan**

**Latar belakang**

Reformasi birokrasi merupakan amanat pemerintah yang dilimpahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pentingnya Reformasi Birokrasi kembali ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, dengan di tempatkannya Reformasi Birokrasi sebagai agenda pembangunan nasional, terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (Atmaji, Dwi Wahyu; 2018).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melaksanakan Reformasi Birokrasi periode pertama (2010-2014) dan pada periode kedua (2015-2019) pelaksanaan Reformasi Birokrasi, LIPI bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi LIPI, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi LIPI 2015-2019 untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan LIPI. Reformasi Birokrasi LIPI periode kedua ini diarahkan kepada peningkatan kualitas terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; 6) Penguatan Akuntabilitas; 7) Penguatan Pengawasan; dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

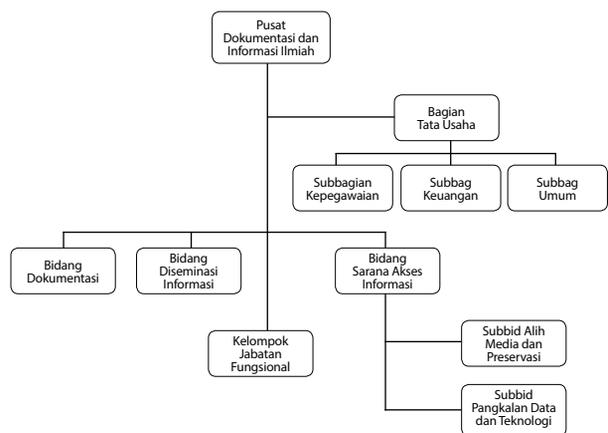
Adapun sasaran Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 adalah: 1) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, 2) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan 3) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Widyatmoko, Didik; 2017). Mengacu kepada ketiga sasaran Reformasi Birokrasi di atas maka Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) akan fokus kepada butir nomor tiga, yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat”. Hal tersebut didasarkan kepada Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pasal 360 yang menyatakan bahwa PDII mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian informasi ilmiah, menyediakan akses

ke informasi ilmiah, dan pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya PDII menyelenggarakan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang ada, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi;
- b. Pendokumentasian informasi ilmiah;
- c. Penyediaan akses ke informasi ilmiah;
- d. Pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendokumentasian informasi ilmiah, penyediaan akses ke informasi ilmiah, pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Berikut adalah struktur organisasi PDII LIPI sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Gambar 1. Struktur organisasi PDII (Sumber gambar: Laporan Tahunan PDII LIPI Tahun 2017)

**Permasalahan**

PDII selaku unit kerja di LIPI dengan tugas utamanya di bidang layanan publik belum secara eksplisit menyebarluaskan/mendiseminasikan peran strategisnya di dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di instansi induknya yaitu LIPI.

### Tujuan kajian

Tujuan kajian adalah untuk menguraikan serta mendeskripsikan peran apa yang diberikan oleh PDII selaku unit kerja dengan tugas fungsi utamanya adalah pelayanan publik di bidang penyediaan informasi.

### Metode kajian

Kajian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan cara mencermati sumber informasi yang berhasil dikumpulkan tentang topik peran PDII selaku perpustakaan khusus dalam implementasi Reformasi Birokrasi lembaga induknya. Selanjutnya sumber informasi dibaca, dipahami untuk dituliskan kembali apa adanya tanpa memberikan persepsi terhadap data yang ada, kemudian dilakukan pembahasan dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan.

### Hasil dan pembahasan

Mengacu kepada sasaran 2015-2019 yang berbunyi “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat”, maka strategi yang dilakukan PDII adalah sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan publik dengan fokus kepada sumber daya manusia pejabat fungsional Pustakawan.

Sebagai gambaran kondisi sumber daya manusia PDII pada 2017 menurut jenis jabatan fungsional yang diembannya adalah seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. SDM PDII LIPI menurut Jenis Jabatan Fungsional Tahun 2017

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Pustakawan	23	22%
2	Arsiparis	12	11%
3	Peneliti	10	10%
4	Pranata Komputer	3	3%
5	Pranata Humas	2	2%
6	Analisis Kepegawaian	1	1%
7	Perencana	0	0%
8	Struktural	10	10%
9	Fungsional Umum	52	50%
10	Diperbantukan	2	2%
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>100 %</b>

(Sumber: Laporan Tahunan PDII LIPI Tahun 2017)

Apabila dilihat dari jumlah pustakawan sebanyak 23 orang (22%), menunjukkan bahwa porsi untuk pejabat fungsional pustakawan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada PDII. Namun dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM maka mereka diikutkan dalam pendidikan dan latihan baik yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional maupun internal PDII LIPI/LIPI. Hampir setengah dari SDM PDII masih duduk sebagai Fungsional Umum, sehingga mereka harus segera dialih fungsikan menjadi pejabat fungsional tertentu.

Beberapa hambatan yang dialami oleh PDII untuk mengalihkan jabatan mereka adalah batasan usia, serta syarat pendidikan yang harus dipenuhi guna menduduki jabatan fungsional tertentu. Beruntungnya pemerintah memberikan peluang kepada mereka untuk mengikuti *inpassing* dari jabatan fungsional umum ke fungsional tertentu. Pada Oktober 2018 ini tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang akan mengikuti kesempatan tersebut dan mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional pustakawan, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional.

Selain hal di atas para Pejabat Fungsional Pustakawan PDII juga mengikuti sertifikasi profesi serta uji kompetensi di bidang kepustakawanan terutama bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pustakawan setingkat lebih tinggi agar dapat memberikan pelayanan secara prima kepada pemustaka.

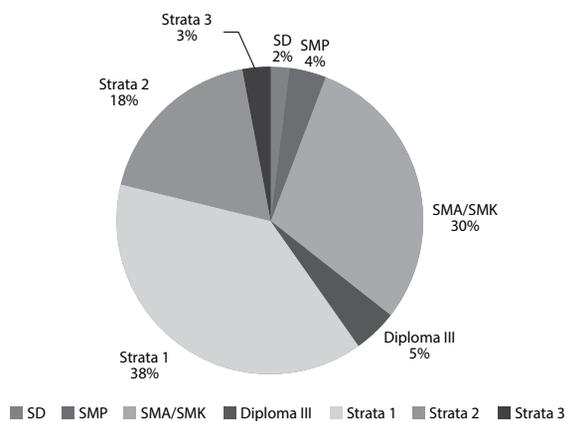
Tabel 2. Bidang keilmuan SDM PDII LIPI

Bidang Ilmu	Jumlah
Ilmu Perpustakaan	12
Studi Lingkungan	3
Biologi	1
Manajemen Pendidikan	1
Matematika	1
Ilmu Teknik Kimia	2
Administrasi Publik/ Negara	8
Sosial Politik	2
Ilmu Teknik Komputer	8
Ilmu Teknologi Informasi	7
Pertanian	3
Antropologi	1
Ilmu Hukum	1

Ilmu Komunikasi	3
Manajemen/ Ekonomi/ Akuntansi	4
Ilmu Linguistik	1
Teknik Industri	1
Sistem Informasi	1
Desain Komunikasi Visual	1
Tenaga Kelistrikan	1
Umum	52
<b>Jumlah</b>	<b>105</b>

(Sumber: Laporan Tahunan PDII LIPI Tahun 2017)

Jika melihat komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) PDII menurut tingkat pendidikan, maka dapat diketahui bahwa masih dijumpai SDM dengan pendidikan Sekolah Dasar (2%), Sekolah Menengah Pertama (3%) dan Sekolah Menengah Atas (30%). Melihat komposisi tersebut diperlukan upaya lebih kuat dari PDII agar memberikan kesempatan pada mereka untuk meningkatkan pendidikan. Namun usia SDM seringkali menjadi penghambat seseorang untuk melanjutkan jenjang pendidikan (Tabel 3).



Gambar 2. Tingkat pendidikan SDM PDII LIPI

Usia SDM PDII terbanyak berkisar antara 51-55 tahun (25,71%) dan jika jarak tersebut diperluas menjadi 46-60 tahun maka jumlah SDM menjadi 57 orang (54,28%), mereka akan kesulitan untuk mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu solusi yang diambil oleh PDII adalah dengan mengikut sertakan SDM ke dalam berbagai kursus yang berkaitan dengan kepustakawanan dan diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia sebagai contoh pada tahun 2017 dan 2018: Kursus Pengolahan Bahan Perpustakaan Menggunakan RDA (2 orang)

TOT Jabatan Fungsional Pustakawan (1 orang), Kursus Manajemen Perpustakaan (1 orang), Kursus Penulisan Karya Ilmiah di Bidang Kepustakawanan (1 orang).

Kursus internal juga dilakukan oleh PDII dengan harapan peserta bisa lebih banyak diantaranya adalah Pelatihan Pelayanan Referensi, Pelatihan Pelestarian Bahan Pustaka, Pelatihan Jurnal Elektronik, Pelatihan Penerbitan Majalah Ilmiah, Pelatihan Publikasi Ilmiah di Era Digital. Selain peserta dari SDM PDII, pelatihan tersebut juga diperuntukkan bagi *stakeholder* atau masyarakat umum yang berminat. Peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan dengan mengikutsertakan dalam berbagai pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya dan sejenisnya, diantaranya Lokakarya Nasional Dokumentasi dan Informasi, Kongres Perpustakaan Digital Indonesia.

Tabel 3. Komposisi SDM menurut Usia

No.	USIA	JUMLAH	%
1	<25>	3	2,85
2	25-30	10	9,52
3	31-35	9	8,57
4	36-40	15	14,28
5	41-45	11	10,48
6	46-50	12	11,43
7	51-55	27	25,71
8	56-60	18	17,14
9	61-65	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>105</b>	<b>100</b>

(Sumber: Diolah dari data Sub Bidang Kepegawaian PDII LIPI Desember 2017)

Strategi berikutnya adalah dengan merekrut CPNS berpendidikan S2 dan S3, namun kendala yang dihadapi adalah bahwa LIPI lebih mengutamakan perekrutan calon tenaga peneliti dibandingkan dengan calon tenaga pustakawan. Bagi SDM yang berusia 25-45 tahun yang berjumlah 48 orang (45,72%) masih dimungkinkan untuk meningkatkan kapasitasnya melalui jalur pendidikan formal. Hingga saat ini SDM yang sedang bersekolah S2 dan S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri berjumlah 10 orang.

## 2. Meningkatkan Kualitas Layanan PDII

### a. Jasa Perpustakaan dan Penelusuran Informasi Literatur

Jasa layanan perpustakaan dan penelusuran informasi ilmiah merupakan jasa yang memerlukan kesiapsiagaan pustakawan di dalam memberikan layanan prima kepada pemustaka. Layanan dapat diberikan secara langsung ke PDII atau menggunakan media sosial, *instant messenger*, *e-mail*, dan telepon. Penggunaan *tagline* layanan “Anda Bertanya, Kami Menjawab”, dapat mempercepat layanan. Guna menjaga kualitas layanan strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan ISO 9001:2008 dan meningkatnya menjadi ISO 9001:2015.

### b. Jasa penerbitan ISSN

International Standard of Serial Number (ISSN) digunakan oleh PDII untuk memantau penerbitan berseri di Indonesia. Nomor tersebut merupakan penanda unik bagi terbitan berseri dan berlaku global. ISSN terdiri atas delapan digit nomor unik yang terbagi menjadi 2, masing-masing 4 digit dan dibatasi dengan tanda penghubung (-). Digit terakhir berupa angka 0 sampai 9 atau X (10), yang disebut sebagai cek digit. “X” harus ditulis dengan huruf besar. Seperti halnya layanan perpustakaan dan penelusuran informasi literatur, maka untuk menjaga kualitas layanan penerbitan ISSN sudah dilakukan secara *on-line* (<http://issn.pdii.lipi.go.id/>), serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dan sudah diperbarui menjadi ISO 9001:2015.



Gambar 3. Sertifikat ISO 9001:2015.

Kedua jasa tersebut setiap tahun secara rutin diaudit baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Walaupun sudah bersertifikat ISO, namun PDII tetap melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kedua jasa di atas. Survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, dan diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik. Adapun perbedaan yang mendasar dari kedua PermenPAN tersebut adalah pada Maklumat Pelayanan yang ditetapkan sebagai salah satu butir penilaian di PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2014 namun tidak diperhitungkan lagi di PermenPAN No 14 Tahun 2017. Butir tersebut diganti dengan sarana dan prasarana yang belum terakomodasi di PerMenPAN RB No 16 Tahun 2014.

Agar lebih jelas maka tabel 4. berikut ini menunjukkan perbedaan butir-butir yang diakses dalam kedua PermenPAN RB tersebut.

Tabel 4. Perbedaan butir-butir PermenPAN RB No 16 Tahun 2014 dan PermenPAN No. 14 Tahun 2017

PermenPAN RB No 16 Tahun 2014	PermenPAN No 14 Tahun 2017.
1. Persyaratan	1. Persyaratan
2. Prosedur	2.Sistem, mekanisme, prosedur
3. Waktu pelayanan	3.Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif	4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis layanan	5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana	6.Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana	7.Perilaku pelaksana
8. Maklumat pelayanan	8.Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	9. Sarana dan prasarana

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Layanan PDII LIPI berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah 75.750, 81.770 dan 81.378. Dengan demikian sasaran yang dirumuskan di depan, yaitu: terjadinya peningkatan kualitas layanan sudah tercapai dan akan tetap diteruskan di tahun-tahun yang akan datang. Terjadinya penurunan nilai IKM sebesar 0,392 pada tahun 2017 diduga akibat faktor ketidaknyamanan ruangan perpustakaan terutama karena AC (pendingin ruangan) tidak berfungsi. Kondisi tersebut menyebabkan baik para pemustaka yang datang maupun pustakawan yang memberikan layanan mengeluhkan panasnya ruangan.

### 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

PDII LIPI memiliki sarana prasarana yang mendukung layanan bagi para pengguna. Beberapa sarana prasarana utama yang penting di PDII LIPI adalah:

- 1) *Server* untuk penyimpanan (deposit), pengolahan dan diseminasi;
- 2) Perangkat komputer (PC dan laptop) untuk pengelolaan konten repositori dan depositori;
- 3) *Printer* dan *scanner* untuk mendukung kegiatan alih media;
- 4) Sejumlah alat kerja pendukung, seperti standar Thesaurus iptek dari berbagai disiplin ilmu, *DDC*,

*LC*, *MARC 21*, *RDA* untuk melakukan katalogisasi dan validasi informasi iptek ke dalam pangkalan data;

- 5) Koleksi: buku sejumlah 83.985 eksemplar, makalah sejumlah 80.836, Laporan penelitian sejumlah 79.006, paten sejumlah 6.859, dan artikel jurnal ilmiah sejumlah 351.308 cantuman;
- 6) Akses informasi yang disediakan PDII LIPI terdiri atas akses terhadap situs *web* dan beberapa *database* jurnal ilmiah Indonesia dan luar negeri. *Database* luar negeri yang dapat diakses melalui jaringan PDII LIPI adalah *Springer-Link* dan *J-Stor*. PDII LIPI juga memberikan akses ke *database* jurnal ilmiah di Indonesia yang dikembangkan sendiri oleh PDII LIPI, yaitu *database* ISJD. ISJD berisi 319.146 artikel dari 8.234 jurnal nasional. Selain itu, PDII LIPI juga membangun *web* dan aktif di media sosial untuk memberikan layanan ke masyarakat luas.

### 4. Meningkatkan kerjasama layanan antar stakeholder

Sebagai institusi pemerintah di bawah LIPI yang bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi ilmiah, penyelenggaraan kerjasama dengan institusi mitra baik di dalam maupun di luar negeri merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diselenggarakan di PDII LIPI serta mendukung tugas dan fungsi PDII LIPI di bidang dokumentasi dan informasi ilmiah. Ruang lingkup kerjasama yang dilaksanakan mencakup berbagai kegiatan yang disepakati dan dibutuhkan oleh pihak mitra kerjasama, antara lain kerjasama di bidang akses jurnal ilmiah, pengelolaan informasi ilmiah, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sistem informasi. Kegiatan-kegiatan kerjasama tersebut dikoordinasikan melalui Sub Bagian Umum di Bagian Tata Usaha.

Kerjasama terpenting yang dilakukan PDII LIPI adalah kerjasama dengan para penerbit jurnal/ majalah ilmiah di Indonesia dalam hal pendaftaran nomor ISSN baik yang berbentuk jurnal tercetak maupun jurnal *online*. Melalui kerjasama tersebut para penerbit akan lebih mudah di dalam memperoleh pelayanan pendaftaran ISSN. Kerjasama juga dilakukan dengan satuan kerja yang berada di

bawah LIPI, PDII berkepentingan sekaligus sebagai pembina para pejabat fungsional di lingkungan LIPI, untuk menyukseskan visi dan misi PDII yaitu sebagai Pusat Repositori dan Depositori Lembaga. Kerjasama dengan Universitas Achmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Respati Jakarta, dilakukan dalam rangka kerjasama akses informasi *database* ISJD.

#### 5. Menanamkan nilai-nilai yang dianut di PDII

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness process*) dan sumber daya manusia aparatur. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Manajemen perubahan di PDII LIPI bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind-set*), kompetensi, serta budaya kerja (*culture-set*) individu guna menunjang penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik tanpa praktek-praktek yang melanggar etika dan norma hukum yang berlaku. Budaya kerja dan pola pikir sesuai dengan kondisi ideal mulai dibangun di lingkungan PDII LIPI. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah melalui budaya kerja yang dituangkan melalui jargon perubahan PDII yang diberi nama "IDAMAN" yang merupakan singkatan dari kata-kata Ikhlas, Disiplin, Amanah, Mandiri, Akuntabel, dan Normatif. Penjabaran masing-masing kata dalam jargon tersebut merupakan kondisi ideal yang harus diwujudkan oleh masing-masing individu pegawai, dengan meniadakan budaya dan perilaku negatif.

Salah satu upaya agar SDM PDII terutama Pejabat Fungsional Pustakawan selalu ingat akan IDAMAN adalah dengan memasang gambar-gambar di tempat strategis salah satunya adalah di lift. Gambar-gambar tersebut memberikan ilustrasi dari unsur-unsur IDAMAN. Gambar dibuat oleh Tim Reformasi Birokrasi dalam hal ini Tim Agen Perubahan dan setiap bulan dibuatlah gambar baru agar para pustakawan PDII terdorong untuk terinspirasi.



Gambar 4. Membudayakan IDAMAN melalui gambar

Gambar 4. yang berjudul ANGIN memberikan inspirasi agar SDM PDII terutama para pustakawan kuat dalam hal memegang prinsip disiplin, terutama disiplin waktu. Diharapkan para pustakawan PDII paham betul bahwa waktu pelayanan bagi pemustaka adalah dari pukul 07.30-16.00 WIB. Jadi walaupun godaan untuk meninggalkan ruangan walaupun tidak ada pengunjung tidak akan menggoyahkan iman para pustakawan untuk mengikuti ajakan baik teman untuk meninggalkan ruang pelayanan kecuali darurat serta disediakan petugas pengganti.

PDII juga mewajibkan staf termasuk Pejabat Fungsional Pustakawan untuk menandatangani Pakta Integritas yang butir-butir pakta tersebut berisikan nilai-nilai yang wajib dianut, yaitu: 1) Berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 2) Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; 4) Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas; 5) Memberi contoh terhadap kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 6) Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di PDII LIPI serta turut serta menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran yang dilaporkannya; 7) Bila

saya melanggar hal-hal tersebut saya siap menghadapi konsekuensinya. Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas oleh seluruh sivitas PDII LIPI makna nilai-nilai dalam IDAMAN maupun Pakta Integritas dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima Peran Strategis PDII LIPI dalam

Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Induknya (LIPI), yaitu: 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi profesi dan uji kompetensi; 2) Meningkatkan kualitas layanan PDII melalui ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan; 4) Meningkatkan kerjasama layanan antar *stakeholder*; 5) Menanamkan nilai-nilai yang dianut di PDII (IDAMAN).

---

### **Daftar Pustaka**

---

- Atmaji;Dwi Wahyu. (2016). *Relevansi dan Kontekstualisasi Strategi Reformasi Birokrasi 2015-2019*. Diakses 11 Oktober 2018 dari <https://www.menpan.go.id/site/cerita-sukses-rb/relevansi-dan-kontekstualisasi-strategi-reformasi-birokrasi-2015-2019-1>
- Didik Widyatmoko; Sarwintyas Prahastuti; Dwi Susilaningsih; Muhammad Rofi’l. (2018). Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2017 Tim Kerja Program Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2015-2019.
- Kementerian PANRB. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 2014.
- Kementerian PANRB. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2014). Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. (2018). Pakta integritas PDII LIPI.
- Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. (2018). Koleksi gambar untuk membudayakan IDAMAN di PDII LIPI.
- Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. (2018). *Laporan Tahunan PDII LIPI, 2017*. Jakarta, PDII LIPI.
- Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. (2018). *Laporan Sub Bagian Kepegawaian*. Jakarta, PDII LIPI.